



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



BULETIN

MINGGU
KE-

2

JULI 2025

KEMENKUM KALSEL NEWS



AUDIENSI LAYANAN
KETERANGAN AHLI



PERKUAT PERLINDUNGAN
KI



HARMONISASI
RANPERBUP RKPD

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



Plt. Kepala Kantor Wilayah Pimpin Apel Pagi, Evaluasi dan Akselerasi Kinerja Jadi Fokus Utama



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Apel Pagi pada Senin (07/07) yang berlangsung di halaman parkir kantor wilayah. Apel pagi ini menjadi momentum semangat kerja memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2025.

Apel dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, dengan Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah, bertindak selaku Pembina Apel. Dalam amanatnya, Meidy Firmansyah menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja di semester I tahun ini.

“Kita telah melewati semester I Tahun 2025. Saya minta seluruh jajaran untuk segera mengecek kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan, termasuk Rencana Penarikan Dana (RPD) kedepan dan capaian serapan anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, baik setiap triwulan maupun setiap semester, guna memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan, Meidy Firmansyah menekankan perlunya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.



“Selain laporan atensi, hendaknya juga disiapkan laporan tertulis sebagai bahan pelaporan kinerja kita nantinya,” imbuhnya.

Kegiatan Apel Pagi ini diikuti oleh para pejabat manajerial, pegawai, serta jajaran pelaksana di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, yang menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di bidang hukum.



Kemenkum Kalsel Hadiri Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester I 2025



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara virtual Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2025 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah, Senin (07/07/2025).

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, bersama Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini dari ruang rapat Kepala Kantor Wilayah.

Acara pembukaan berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WITA, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sri Yusfina Yusuf. Dalam sambutannya, Sri Yusfina menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta unit utama atas dukungan dalam penyusunan Laporan Keuangan Hukum dan HAM Tahun 2024 Audited.

“Kami mengapresiasi kerja sama seluruh satuan kerja, kantor wilayah, dan unit utama yang telah mendukung penyusunan Laporan Keuangan Hukum dan HAM 2024 Audited,” ujarnya.

Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni pada 7–11 Juli 2025. Sementara itu, rekonsiliasi untuk tingkat Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dijadwalkan pada 8 Juli 2025.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaporan keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum semakin tertib, akurat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.



Kemenkum Kalsel Gelar FGD Pengumpulan Data SPAK-SPKP Kantor Wilayah Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka mendukung proses evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di masa transisi kelembagaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data SPAK-SPKP Tahun 2025, pada Selasa (08/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin langsung oleh Eldy Prasetya Setyawan selaku Analis Hukum Ahli Muda dari Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum Kalsel.

FGD ini menjadi bagian penting dari tahapan evaluasi semester I (Januari–Juni) tahun 2025, yang dilaksanakan untuk menginventarisir kendala pelaksanaan survei di tengah masa transisi perubahan nama kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai langkah awal, setiap perwakilan Tim Kerja (Timja) diminta menyampaikan daftar inventarisasi permasalahan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan survei pelayanan publik selama masa transisi. Hasil dari kegiatan ini akan disusun dalam laporan evaluasi pelaksanaan SPAK dan SPKP, yang mencakup empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan monitoring rencana tindak lanjut.

Peserta FGD merupakan perwakilan dari pelaksana layanan publik di lingkungan Kantor Wilayah, yang terdiri dari Kepala Bidang serta Ketua Tim Kerja di bidang pelayanan AHU, KI, pembentukan produk hukum daerah, perancang peraturan, JDIH, bantuan hukum, penyuluhan hukum, SDM, hingga kehumasan dan layanan pengaduan.

Melalui FGD ini, tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum berupaya menggali data empiris dan mendalam atas kendala yang dihadapi unit layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data ini nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya pada fase transisi kelembagaan.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik

Harmonisasi Ranperbup RKPD Kabupaten Balangan 2026, Kanwil Kalsel Pastikan Kesesuaian Norma dan Kaidah Pembentukan



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Balangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Selasa (08/07).

Harmonisasi dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, M. Roji didampingi perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, M. Roji menjelaskan bahwa Ranperbup ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

“Kami berharap draft rancangan ini dapat memenuhi norma dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, M. Roji menambahkan bahwa RKPD Tahun 2026 ini memiliki peran strategis sebagai landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan substansi Ranperbup dapat lebih tertata, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih optimal dan akuntabel.



Sinergi Pembentukan Perda, DPRD Barito Kuala dan Kemenkum Kalsel Bahas MoU dan PKS



Banjarmasin, PPPH_Info - Dalam rangka mempererat jalinan kerja sama dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada Selasa (08/07/2025) yang diwakili oleh Muhammad Yayan, selaku Kepala Bagian Persidangan dan Hukum, beserta jajaran.

Tim Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala diterima langsung oleh Muhammad Rezki Kusuma, selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, Lely Hayati dan Nizar Al Farisy, yang masing-masing sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



Tujuan utama kunjungan kerja ini adalah untuk membicarakan penyusunan MoU antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang mengatur cakupan kerja sama dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum lainnya.

Lebih konkretnya lagi, dibahas juga rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagai turunan dari MoU tersebut, berkenaan dengan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yaitu tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.



Sangat diharapkan dengan penandatanganan MoU dan kerja sama penyusunan produk hukum daerah ini akan semakin memperkuat peran masing-masing kedua instansi ini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan selaku kepanjangan tangan kementerian dalam tugas dan fungsi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.



Direktorat Pidana AHU dan Kanwil Kemenkum Kalsel Tingkatkan Sinergi dengan Polda Kalsel



Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat sinergitas antara Kementerian Hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH), Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melaksanakan kegiatan Koordinasi Layanan Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Hukum Pidana bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bertempat di Mapolda Kalimantan Selatan (8/7/25).

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel). Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Pidana Ditjen AHU, Taufiqurrakhman; Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan; Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana; Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka; Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari; Dirreskrim Polda Kalsel, Kombes Pol. Frido Situmorang; Wadirreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Riza Muttaqin; serta Kepala Bidang Hukum Polda Kalsel, Kombes Pol. Arif Hidayat Ritonga.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pidana menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama teknis antara Ditjen AHU dan APH, khususnya terkait dengan layanan pemberian keterangan ahli dalam perkara pidana. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dan sinergi agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemberian keterangan ahli merupakan bentuk dukungan konkret kami dalam mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus diperkuat agar berjalan searah dan saling melengkapi," tegasnya. Kapolda Kalimantan Selatan menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Polda untuk bersinergi lebih erat dengan Kementerian Hukum dalam mendukung penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam aspek keahlian hukum.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Direktur Pidana dan jajaran Kemenkum. Sinergi seperti ini sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan integratif dan profesional, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan pendalaman aspek hukum," ujarnya.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, juga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini. "Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan teknis dalam setiap upaya penguatan sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam layanan hukum yang melibatkan lintas sektor," ucap Meidy.

Setelah kegiatan di Mapolda Kalsel, Tim Direktorat Pidana bersama jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel juga melanjutkan kunjungan ke Polres Kota Banjarbaru untuk melakukan koordinasi serupa. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Pidana serta penguatan hubungan kelembagaan dengan kepolisian daerah.

Tim Direktorat Pidana AHU dan Kemenkum Kalsel Audiensi Layanan Keterangan Ahli Bersama Jajaran Polresta Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info – Tim Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melakukan audiensi bersama jajaran Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, Selasa (8/7/2025). Audiensi ini membahas layanan pemberian keterangan ahli di bidang hukum pidana sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergitas antara Kementerian Hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Tim disambut langsung oleh Wakapolres Banjarbaru, Kompol Letjon Simanjorang, beserta jajaran. Dalam sambutannya, Wakapolres menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran layanan ini.

“Selama ini kami biasanya mengambil keterangan ahli dari kalangan akademisi, seperti perguruan tinggi. Kehadiran layanan dari Direktorat Pidana Ditjen AHU ini tentu sangat membantu proses penegakan hukum, karena langsung disampaikan oleh pihak yang kompeten dari kementerian,” ungkapnya.

Tim Direktorat Pidana Ditjen AHU diwakili oleh MH. Arifin selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Hukum Pidana, Oloan CH Marpaung selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, dan didampingi oleh Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, beserta jajaran.

Arifin menjelaskan bahwa layanan pemberian keterangan ahli merupakan bentuk konkret kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung proses peradilan pidana.

“Kami hadir untuk memberikan keterangan ahli yang sah dan terukur secara hukum, sebagai bagian dari fungsi teknis kementerian dalam mendukung kerja aparat penegak hukum di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Oloan CH Marpaung menambahkan bahwa kegiatan audiensi ini juga menjadi sarana membangun komunikasi lintas lembaga secara terbuka dan solutif.

“Koordinasi ini penting agar ke depan tidak terjadi kebingungan atau kendala dalam proses permintaan keterangan ahli, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan pendapat hukum yang kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Dewi Woro Lestari menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus memberikan dukungan dan fasilitasi teknis di wilayah.

“Kami siap menjadi jembatan antara aparat penegak hukum di daerah dengan pusat, agar layanan ini bisa diakses secara cepat dan tepat,” ucapnya.

Kegiatan audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Direktorat Pidana AHU ke wilayah Kalimantan Selatan sebagai langkah memperluas jangkauan layanan hukum yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum di daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info — Selasa (08/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kegiatan diikuti oleh jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil dari seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, di ruang rapat BerAkhlak Kanwil Kemenkum Kalsel. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman teknis mengenai pengukuran tingkat kematangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di daerah, baik dari sisi regulasi, pemanfaatan, hingga penegakan hukum.

Dalam paparannya, DJKI menjelaskan pentingnya pengukuran maturitas KI sebagai dasar kebijakan peningkatan perlindungan, penegakan, dan pemanfaatan KI secara strategis dan berkelanjutan, yang sejalan dengan rencana strategis Kemenkum 2025-2029. Pengukuran akan dilakukan dengan metode evidence-based melalui lima indikator utama, yaitu regulasi dan penerapannya, riset dan pengembangan, pemanfaatan/hilirisasi, efisiensi sistemik kelembagaan, dan penegakan hukum.

Peserta sosialisasi juga mendapatkan penjelasan rinci mengenai instrumen survei, tata cara pengisian, serta dokumen data dukung yang wajib dilampirkan. DJKI mengingatkan seluruh Kanwil untuk melakukan pengisian survei secara objektif mulai 8 hingga 11 Juli 2025 sebagai bagian dari kesiapan wilayah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan KI.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar dan menjadi ruang diskusi yang produktif bagi para peserta untuk menyamakan persepsi serta membahas kendala yang mungkin timbul di lapangan. Ia berharap hasil pengukuran nantinya dapat menjadi pijakan untuk peningkatan layanan KI di Kalimantan Selatan.

“Kami akan segera menindaklanjuti arahan DJKI dengan memastikan pengisian survei dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kami juga akan menginformasikan pengukuran maturitas KI ini kepada pemangku kepentingan di daerah, termasuk asosiasi dan pemilik KI, agar ekosistem KI di Kalimantan Selatan semakin berkembang,” ujar Meidy.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperjelas aspek-aspek teknis pengukuran serta strategi pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel optimistis mampu melaksanakan pengukuran secara tepat, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat pemilik KI di daerah.



Maksimalkan Potensi Kepala Desa dan Lurah: Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pendampingan Aktualisasi Peserta Peacemaker Justice Award 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka mendukung gelaran Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bersama Tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda) melaksanakan kegiatan pendampingan aktualisasi peserta PJA bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan Guntur Ferry Fahrar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin R. S. dan Dana Hanura, Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Maman S., serta Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa Husairi, serta para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Desa dan Lurah diundang sebagai peserta kegiatan, yang berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat menyelesaikan tahapan aktualisasi dan melengkapi data dukung melalui aplikasi pja.go.id.

"Kita berharap seluruh peserta dapat lolos dalam gelaran PJA tahun ini. Lengkapi seluruh data dukung aktualisasi pada aplikasi pja.go.id. Jika terdapat kendala, harap segera dikomunikasikan untuk dibahas dan diselesaikan. Setelah itu, data dapat segera diunggah," ujar Guntur.

Senada dengan hal tersebut, Anton Edward Wardhana turut menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta. "Kami mengapresiasi semangat para Kepala Desa dan Lurah yang tengah berjuang dalam ajang PJA 2025. Manfaatkan waktu yang tersisa hingga 11 Juli untuk melengkapi seluruh data dukung agar meraih nilai maksimal. Kehadiran Kades dan Lurah sebagai peserta mencerminkan peran aktif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat," ungkap Anton.

Selama kegiatan berlangsung, masing-masing peserta dipanggil secara bergantian untuk mendapatkan arahan dan bimbingan terkait penyusunan pelaporan aktualisasi. Pendampingan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta menghadapi seleksi nasional dan memastikan kelengkapan data yang dilaporkan kepada Panselda Provinsi. Adapun poin-poin laporan yang diperiksa mencakup:

1. Pelaporan ketersediaan sarana dan prasarana Posbakum;
2. Pelaksanaan sosialisasi Posbakum;
3. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi;
4. SK Kadarkum, SK Posbakum, dan tagging Google Map Posbakum;
5. Pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kegiatan berlangsung lancar dalam suasana kolaboratif antar instansi. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program Unit Eselon I, termasuk gelaran Peacemaker Justice Award Tahun 2025.

Di Depan 194 Negara, Menkum Supratman Umumkan Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual



Jenewa — Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pernyataan resmi mewakili Pemerintah Indonesia dalam pembukaan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss. Dalam forum internasional tersebut, Supratman menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI).

“Selaras dengan poin empat Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuan kami adalah menyediakan layanan KI yang lebih cepat, lebih transparan, inklusif, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku bisnis. Untuk itu, kami sedang mencari berbagai alternatif dan teknologi termasuk milik WIPO untuk meningkatkan produktivitas dan membuat sistem lebih mudah diakses lagi,” ujar Supratman di hadapan para delegasi negara anggota pada Selasa, 8 Juli 2025.

Dalam pidatonya, Supratman menekankan bahwa percepatan transformasi digital di sektor KI merupakan respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi berbasis inovasi. Menurutnya Indonesia juga ingin menjadi negara yang aktif membentuk ekosistem KI global yang inklusif dan berdaya saing. Saat ini semua layanan KI di Indonesia sudah dilakukan secara daring, mulai dari layanan pengajuan permohonan, pasca permohonan, bahkan pengaduan dan permintaan informasi juga bisa dilakukan secara online.

Transformasi digital layanan KI berdampak bagi peningkatan jumlah permohonan KI di Indonesia yang terus meningkat selama satu dekade terakhir. Jumlah permohonan KI di semester I tahun 2025 sebanyak 152.115 permohonan atau 20,02% lebih banyak dibandingkan semester I tahun 2024 yang mencapai 126.744 permohonan. Pencatatan hak cipta sebanyak 78.209 mendominasi jumlah permohonan KI ini, disusul oleh merek sebanyak 64.388 permohonan. Permohonan paten dan desain industri juga meningkat. Permohonan paten sebanyak 5.831 permohonan, disusul desain industri dengan 3.668 permohonan. Sebagai bentuk konkret dari penguatan ekosistem KI, Supratman juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah memutakhirkan regulasi nasional, seperti revisi Undang-Undang Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta.

Langkah legislasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak para kreator dan inovator secara lebih adaptif. Menandai peran aktif Indonesia dalam mempromosikan ekonomi kreatif berbasis KI, delegasi Indonesia juga mempersembahkan sebuah pameran khusus bertajuk “Local Roots, Global Reach: Showcasing Indonesia’s Intellectual Properties” sebagai bagian dari kegiatan sampingan Sidang Umum WIPO. Pameran ini menampilkan karya dan produk unggulan berbasis KI yang lahir dari kekayaan budaya dan inovasi lokal Indonesia. “Kami mengundang seluruh delegasi untuk mampir ke pameran kami, menikmati karya-karya yang dipamerkan, dan tentu saja berinteraksi langsung dengan para kreatornya,” ajak Supratman.

Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai dukungan teknis dan pengembangan kapasitas dari WIPO, khususnya dalam bidang komersialisasi KI, pengembangan UMKM, dan penguatan branding Indikasi Geografis. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama internasional dalam penguatan sistem KI global yang adil dan berkelanjutan.

Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat mempercepat terwujudnya sistem perlindungan KI yang modern, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem ini akan mendukung kesadaran dan pemahaman KI yang terus meningkat di Indonesia agar semakin tangguh dalam menghadapi era digital serta kompetisi global yang semakin dinamis.

Sidang Umum WIPO adalah pertemuan tahunan tertinggi dari organisasi ini yang diselenggarakan setiap tahunnya. Peserta sidang umum ini adalah perwakilan 194 negara anggota WIPO, organisasi internasional, serta stakeholder lainnya. Melalui sidang umum ini akan dibahas berbagai kebijakan strategis KI secara global, pembahasan isu KI terkini, serta pengadopsian traktat atau perjanjian internasional terkait KI. Dari Indonesia, selain Menteri Hukum, hadir juga Yovie Widiyanto, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Meidy Firmanysah mendukung penuh Pernyataan Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Sidang Umum WIPO yang menjadi cerminan kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual berbasis digital.

“Kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah transformasi digital yang diusung oleh pusat. Ini menjadi pendorong semangat kami dalam memberikan layanan kekayaan intelektual yang cepat, transparan, dan inklusif kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Perkembangan jumlah permohonan KI secara nasional menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, dan hal ini harus kita imbangi dengan kemudahan layanan yang adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Meidy.



Pemerintah Serahkan DIM RUU KUHAP kepada DPR



Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai RUU KUHAP kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DIM diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, pada rapat kerja bersama Komisi III DPR, Selasa (8/7/2025) siang.

Wamenkum mengatakan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini telah digunakan selama lebih dari 40 tahun. Dalam perjalanannya, penerapan KUHAP ini mendapat tantangan karena berbagai perubahan dan perkembangan hukum, serta berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, diperlukan perubahan KUHAP agar lebih sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.

“Dengan adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, maka diperlukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu,” ujar Wamenkum saat menyampaikan pandangan pemerintah di ruang rapat Komisi III DPR.

Wamen yang akrab disapa Prof. Eddy ini menerangkan bahwa perubahan KUHAP juga diperlukan karena KUHAP yang baru akan segera berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana. “Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum,” tuturnya.

Ia menjelaskan RUU KUHAP mengandung beberapa penguatan norma untuk menyempurnakan hukum acara pidana, di antaranya penguatan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana; pengaturan mekanisme keadilan restoratif; penguatan peran advokat; pengaturan saksi mahkota; hingga pengaturan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.



“Berdasarkan penguatan norma di atas, RUU KUHAP diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana terpadu, yang memperkuat tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan DIM agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kemenkum telah menerima usulan dari tenaga ahli, akademisi, advokat, kementerian/lembaga terkait, dan koalisi masyarakat sipil. Ia berharap proses pembahasan RUU KUHAP dapat berjalan lancar sehingga Indonesia bisa menghasilkan produk hukum baru yang relevan dengan kondisi bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan masukan dalam penyusunan DIM, baik para pakar, advokat, juga koalisi masyarakat sipil. RUU KUHAP ini merupakan hasil kerja kita bersama untuk kemajuan hukum di Indonesia,” ucap Nico.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Meidy Firmanysah menyampaikan bahwa penyerahan DIM RUU KUHAP kepada DPR merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

“Kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyambut baik upaya ini karena pembaruan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi, mempertegas peran advokat dan aparat penegak hukum, serta memastikan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kami siap mendukung proses sosialisasi dan implementasi RUU KUHAP ini agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik hingga ke daerah,” ucapnya.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banjar



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), bertempat di ruang Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah, Rabu, (09/07/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dengan dihadiri oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili Bagian Hukum Setda Banjar serta jajaran tim perancang dari Kanwil Kementerian Hukum Kalsel.

Harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan dari Pemerintah Kabupaten Banjar, yang disampaikan melalui surat resmi tertanggal 13 Juni 2025. Permohonan tersebut merujuk pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur pentingnya proses harmonisasi dalam tahapan pembentukan produk hukum daerah.

Dalam rapat ini, tim perancang bersama perwakilan Pemkab Banjar membahas secara menyeluruh substansi Raperda, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pengakuan resmi, perlindungan hak-hak adat, serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Banjar. Pokok-pokok pembahasan meliputi kriteria penetapan MHA, kelembagaan adat, hak atas tanah ulayat, serta kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pelestarian kearifan lokal.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dalam kesempatan tersebut menyampaikan masukan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.

“Masukan dari kami dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan. Kami juga mengapresiasi Kabupaten Banjar atas kepercayaannya kepada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan untuk melaksanakan proses harmonisasi terhadap Raperda yang diajukan.”

Proses harmonisasi berlangsung secara konstruktif, dengan masukan teknis dari tim Kanwil Kementerian Hukum Kalsel untuk memastikan kesesuaian Raperda dengan norma-norma perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan selesainya proses harmonisasi ini, diharapkan Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat dapat segera dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Banjar untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang berdaya guna dan menjamin kepastian hukum bagi komunitas adat di wilayah tersebut.



Dorong Regulasi Daerah yang Adaptif, Kemenkum Kalimantan Selatan Gelar FGD Pengelolaan Lahan



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan” pada Rabu, 9 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari instansi daerah hingga akademisi.

FGD ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah, mengacu pada Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2025 serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan landasan hukum dalam pengelolaan lahan serta mendorong penyusunan regulasi daerah yang responsif, implementatif, dan selaras dengan norma hukum nasional.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara agraris sangat bergantung pada lahan pertanian, sehingga keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat vital untuk menjaga ketahanan pangan.

“Kami memandang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda-Perda LP2B agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan tema besar nasional dalam analisis Perda, dan Kanwil Kalimantan Selatan memutuskan fokus pada isu pengelolaan lahan sesuai karakteristik dan urgensi wilayah.

Adapun Perda yang menjadi perhatian dalam FGD ini antara lain: Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2014, Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019, Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019, dan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FGD ini adalah Widya Oesman selaku Analis Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Bambang Restu Revianto dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

FGD ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan normatif maupun kendala implementatif, serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan regulasi. Hasil diskusi akan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi LP2B yang ada.

Penuh antusias, para pejabat dari Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten, perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Kantor Wilayah ATR/BPN, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengikuti kegiatan ini dengan harapan kolaborasi yang dibangun dapat memperkuat kebijakan daerah yang berpihak pada keberlanjutan lahan pertanian.

DJKI Tetapkan Kawasan Berbasis KI, Kanwil Kemenkum Kalsel Siap Dorong Potensi Daerah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) sebagai bagian dari Target Kinerja Kantor Wilayah dan Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Rabu (9/07/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia. KBKI 2025 merupakan inisiatif strategis DJKI dalam mendorong pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen pembangunan daerah berbasis potensi lokal.

Program KBKI tahun ini dibagi ke dalam tiga periode penetapan, yaitu: Periode I pada 3 Juni 2025, Periode II pada minggu ketiga Agustus (tentatif), dan Periode III pada November 2025. Dalam pengusulannya, Kantor Wilayah wajib memenuhi persyaratan umum seperti penunjukan PIC, data kawasan, dan kategorisasi menjadi Kawasan Karya Cipta (KKC) atau Kawasan Desain Industri (KDI). Masing-masing kategori memiliki persyaratan khusus berupa dokumen legal hak cipta atau sertifikat desain industri, serta dokumentasi pendukung lainnya.

Laporan pengusulan kawasan harus menyajikan informasi komprehensif, mulai dari latar belakang, hasil koordinasi lintas sektor, identifikasi jenis karya atau desain, bukti kepemilikan hak, hingga potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat dikembangkan dari kawasan tersebut.

“Kami akan berupaya optimal dalam mengidentifikasi dan mengusulkan kawasan potensial di Kalimantan Selatan untuk menjadi bagian dari KBKI 2025. Program ini menjadi kesempatan penting untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong pembangunan ekonomi daerah,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi.

Program KBKI diharapkan menjadi motor penggerak bagi pemberdayaan potensi lokal yang selama ini belum tergali secara maksimal, sekaligus memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual yang berkelanjutan di daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi Notaris Barito Kuala dalam Pengisian Formulir PMPJ



Barito Kuala, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Pengisian Formulir Pemantauan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (09/07) bertempat di Meet Night Caffe, dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Dewi Woro Lestari.

Dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaporan PMPJ sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami kepada para notaris agar dapat menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Ini sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Dalam sesi materi, staf teknis dari Bidang Pelayanan AHU memberikan penjelasan menyeluruh mengenai prinsip dasar PMPJ serta landasan hukum yang mengatur kewajiban pelaporan tersebut. Disampaikan bahwa setiap notaris wajib mengidentifikasi pengguna jasa yang memiliki potensi keterlibatan dalam transaksi mencurigakan, sehingga pengisian formulir PMPJ menjadi langkah krusial dalam mendeteksi aktivitas ilegal secara dini.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan para notaris memiliki pemahaman komprehensif terhadap prosedur pengisian formulir PMPJ, termasuk kelengkapan dokumen pendukung dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi yang membahas implementasi regulasi terbaru di Kabupaten Barito Kuala, seiring dengan penerapan penuh ketentuan pelaporan pada tahun 2025.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para notaris dapat melaksanakan kewajiban pelaporan secara profesional, akurat, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Kegiatan berlangsung secara interaktif, dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Seluruh tim dari Bidang Pelayanan AHU turut memberikan solusi atas berbagai kendala teknis yang dihadapi notaris, guna memastikan pengisian formulir PMPJ berjalan optimal dan mendukung sistem pencegahan tindak pidana ekonomi yang efektif.

Kemenkum Peduli: Semarak Hari Pengayoman ke-80, Kanwil Kemenkum Kalsel Berbagi dengan Masyarakat



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di sekitar Kantor Wilayah dan Panti Asuhan Siti Armah dengan tema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan.”

Kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana pejabat struktural, serta jajaran pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menyerahkan secara langsung bingkisan berupa paket sembako kepada masyarakat sekitar kantor wilayah serta kepada anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Siti Armah. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari penerima.

Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana dalam pengantarnya menyampaikan bahwa bakti sosial menjadi salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Pengayoman ke-80.

“Bakti sosial ini merupakan bukti nyata bahwa Kementerian Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Bakti sosial ini turut menjadi rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-80 yang akan mencapai puncaknya pada 19 Agustus 2025 mendatang dengan beberapa kegiatan seperti Donor Darah dan Tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dan berbagi manfaat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Siti Armah, Nurita, yang menerima langsung kunjungan dan penyerahan bantuan, mengungkapkan apresiasi atas kepedulian yang diberikan.

“Terima kasih banyak atas kepedulian Kanwil Kemenkum Kalsel kepada kami. Jika bukan masyarakat sekitar, siapa lagi yang peduli dengan anak-anak binaan kami,” tuturnya dengan haru.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap semangat Hari Pengayoman ke-80 dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat dan menjadi inspirasi untuk terus menebar kebaikan.

81 Inovasi Daerah Balangan Diakui Secara Hukum, Kemenkum Kalsel Serahkan Surat Pencatatan Ciptaan



Balangan, Humas_Info - Dalam rangka memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menyerahkan 81 Surat Pencatatan Ciptaan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan pada acara yang diselenggarakan di Kantor Bupati Balangan, Rabu (9/7/25). Surat pencatatan tersebut merupakan pengakuan hukum terhadap karya-karya cipta yang dimiliki oleh masyarakat Balangan.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal, khususnya di daerah yang memiliki banyak potensi karya cipta seperti Kabupaten Balangan.

"Perlindungan hukum terhadap karya cipta sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak inovator diakui dan dihargai," tekannya.

Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi turut memaparkan sejarah umum kekayaan intelektual, serta memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kekayaan intelektual yang perlu diketahui oleh masyarakat dan instansi terkait.

Ia juga mengingatkan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual adalah langkah penting dalam melindungi hak cipta dan mendorong lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi daerah.

Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kemenkum Kalsel dalam melindungi hasil karya masyarakat Balangan. Ia menyebutkan bahwa pencatatan resmi ini menjadi semangat baru bagi daerah untuk terus menciptakan inovasi.

"Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap inovator lokal. Dengan adanya pengakuan hukum seperti ini, masyarakat Balangan akan semakin termotivasi untuk berkarya dan berinovasi tanpa takut karyanya diakui oleh pihak lain," ujar H. Abdul Hadi.

Penyerahan 81 Surat Pencatatan Ciptaan ini menjadi simbol awal dari kolaborasi yang erat antara Kemenkum Kalsel dan Pemkab Balangan dalam mendukung dan melindungi karya cipta di daerah tersebut. Sesi diskusi yang dilanjutkan juga memberikan kesempatan bagi SKPD Balangan untuk bertanya dan memberikan masukan terkait implementasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang semakin berkembang.

Kemenkum Kalsel dan Kemenko Bahas Penguatan Tata Kelola Pemilik Manfaat di Wilayah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan kegiatan Uji Petik Pembahasan Rumusan Identifikasi Masalah terhadap tata kelola Beneficial Ownership (BO) dan penguatan sistem informasi digital di wilayah Kalimantan Selatan, Kamis, (10/07/2025).

Kegiatan yang digelar di Kanwil Kemenkum Kalsel ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah bersama Ramelan Suprihadi selaku Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Kemenko Kumham Imipas. Turut hadir Kepala Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari beserta tim teknis dan jajaran.

Uji petik ini merupakan tindak lanjut dari hasil Focus Group Discussion (FGD) nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan prioritas nasional dalam penguatan supremasi hukum melalui sistem informasi hukum yang transparan dan akuntabel.

Dalam paparannya, Ramelan Suprihadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir masalah dan hambatan di lapangan, khususnya terkait pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership).

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Kalsel, tingkat pelaporan BO oleh badan hukum di daerah masih tergolong rendah. Perseroan, yayasan, dan perkumpulan menjadi jenis badan hukum dengan tingkat kepatuhan yang masih perlu ditingkatkan.

“Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban pelaporan BO, ditambah dengan kendala teknis sistem AHU Online dan minimnya sosialisasi dari penyedia jasa hukum,” ungkap Ramelan.

Sementara itu, Meidy Firmansyah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan pelaporan BO.

“Kami siap bersinergi dengan Kemenko dan stakeholders lain dalam mengatasi tantangan ini. Inventarisasi masalah ini penting sebagai dasar kebijakan ke depan,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dibahas berbagai kendala seperti kurangnya integrasi data antar lembaga, keragaman definisi pemilik manfaat, hingga kekhawatiran korporasi terhadap keterbukaan informasi. Hasil uji petik ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke tingkat pusat sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Tapin : Bahas Pajak dan Retribusi Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Tapin pada Kamis, 10 Juli 2025 bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan dalam proses penyusunan produk hukum daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin mengajukan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Ketiga rancangan tersebut mencakup Raperbup tentang Pemungutan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Bukan Logam dan Batuan dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, serta Raperbup tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Opsi sendiri merupakan bagian dari pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan persentase tertentu, dalam hal ini terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang diatur secara khusus dalam kerangka otonomi daerah dan sinergi antar level pemerintahan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, dan dipimpin oleh Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Pokja 1 serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil.

Dalam sambutannya, Anton Edward Wardhana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapin yang dinilai sangat aktif dalam proses harmonisasi peraturan daerah.

Keterlibatan aktif tersebut mencerminkan komitmen serius untuk membentuk regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapin, rapat diikuti oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang diwakili oleh Kabid Penagihan dan Pengendalian, Rakhmadi Maryadi, S.IP, M.AP, serta dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSUD Datu Sanggul, Samsat Rantau, Kecamatan Binuang, Bagian Perlengkapan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Rakhmadi Maryadi dalam forum tersebut turut menyampaikan latar belakang pembentukan ketiga Raperbup tersebut dan meminta masukan dari para perancang di Kanwil Kemenkum Kalsel untuk penyempurnaan naskah regulasi yang diajukan.

Pimpinan rapat menekankan bahwa kegiatan harmonisasi merupakan forum strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selain untuk menyelaraskan substansi rancangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harmonisasi juga bertujuan menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki kejelasan norma, kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Pembahasan dilakukan secara sistematis, dimulai dari judul, ketentuan umum, hingga batang tubuh. Beberapa rumusan pasal dalam rancangan turut disesuaikan agar konsisten dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Rancangan Perbup mengenai pemungutan opsi pajak mineral bukan logam dan batuan disusun berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, Rancangan Perbup tentang tata cara pemungutan retribusi daerah didasarkan pada Pasal 95 ayat (3) Perda Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2024 serta Pasal 65 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur pentingnya kejelasan mekanisme pemungutan oleh daerah.

Sedangkan Rancangan Perbup tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi mengacu pada ketentuan Pasal 104 Perda Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur bahwa perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu, dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menghasilkan regulasi yang aplikatif, tidak multitafsir, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan serta pendapatan asli daerah.

Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Dua Ranperbup Tapin, Fokus pada Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tapin, Kamis (10/07) di Balai Pertemuan Berakhlak, Banjarmasin.

Rapat ini membahas harmonisasi dua regulasi penting, yaitu Ranperbup tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 dan Ranperbup tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2024–2026. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bagian Hukum Setda Tapin.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah menegaskan bahwa harmonisasi peraturan merupakan langkah krusial dalam memastikan keselarasan substansi norma dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

“Kami menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin yang aktif mendorong percepatan pembangunan daerah melalui produk hukum yang responsif terhadap isu-isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Syafrudin menyampaikan Ranperbup Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merancang kebijakan dan program prioritas yang menasar kelompok masyarakat miskin secara sistematis dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, hingga evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

Sementara itu, Ranperbup RAD KLA Tahun 2024–2026 menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan yang menyeluruh, terukur, dan inklusif. Rencana aksi ini disusun untuk menjamin hak-hak dasar anak, membangun sistem perlindungan yang kuat, serta melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam implementasinya.

Kemenkum Kalsel melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum juga memberikan masukan teknis terhadap penyusunan norma dalam kedua rancangan peraturan tersebut, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasinya.

Digelarnya rapat harmonisasi ini, diharapkan penyusunan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, khususnya dalam pemenuhan hak anak dan pengurangan angka kemiskinan.

Kemenkum Kalsel dan Pemkab Balangan Sepakat Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui MoU dan PKS



Balangan, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) bersama Pemerintah Kabupaten Balangan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah, pada Rabu (09/07/2025) di Kantor Bupati Balangan.

Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat Balangan akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai salah satu aset berharga daerah.

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Balangan, H. Abdul Hadi, jajaran pejabat Pemkab Balangan beserta 45 perangkat daerah (SKPD), serta tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan atas komitmennya untuk melindungi dan memberdayakan potensi lokal melalui inovasi dan karya masyarakat.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi titik awal yang baik untuk mendorong tumbuhnya inovasi, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya masyarakat Balangan. Semoga dengan sinergi ini, kita dapat memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan di daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memajukan daerah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.

"Kabupaten Balangan memiliki banyak potensi, inovasi, dan karya masyarakat yang patut dilindungi dan dikembangkan. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan itu," tuturnya.

Melalui MoU dan PKS ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama melaksanakan program-program edukasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesadaran hukum dan perlindungan atas hasil karya masyarakat.



Sesungguhnya Memimpin Itu Sebuah Penderitaan



Jakarta - Menjadi seorang pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Bertekad dengan semboyan Belanda 'leiden is lijden' yang memiliki makna memimpin adalah menderita, seorang pahlawan nasional bernama Agus Salim berhasil paripurna menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) mengangkat kisah moral tentang sosok Agus Salim, seseorang yang memiliki gaya hidup sederhana dan sangat bersahaja, diplomat ulung dan mantan Menteri Luar Negeri, serta menguasai sembilan bahasa tanpa pendidikan formal.

Mengawali kisahnya, cerita pria yang akrab disapa Eddy ini, dalam autobiografi Agus Salim, kalimat pertama yang tertera di bukunya itu berupa tulisan dalam bahasa Belanda, 'leiden is lijden', memimpin itu adalah menderita.

"Mengapa pemimpin itu menderita? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Bagaimana kita menjalankan fungsi pelayanan publik, tata nilai apa yang ada di dalam pelayanan publik," kata Eddy di Graha Pengayoman, Rabu (09/07/2025) pagi. Yang kedua menurut Agus Salim, pemimpin itu adalah sosok yang mengayomi, melindungi, dan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajibannya, tanpa melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada orang lain.

"Dalam suatu kesempatan, saya pernah bertanya kepada Profesor Muladi, mantan Menteri Kehakiman. Saya tanya begini kepada beliau, 'Pak Muladi, bapak ini kan bekerja dengan lima presiden, kira-kira menurut bapak, dari pandangan pribadi bapak, bapak paling aman dan nyaman bekerja dengan siapa?'," kata Eddy.

"Beliau jawab (bekerja) dengan Pak Soeharto. Karena begitu jadi menteri, ia (Muladi) dipanggil, dikasih tugas. Ketika sudah bekerja sesuai dengan tugas, (jika) ada dampak, ada gejolak, Pak Soeharto mengatakan 'Itu bukan tanggung jawab you, (tapi) tanggung jawab saya sebagai pemimpin'," lanjut Wamenkum.

"Jadi beliau merasa aman dan nyaman. Pemimpin seperti itu mengayomi. Itu yang kita butuhkan untuk memajukan kementerian ini," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.

Terakhir, pemimpin itu mampu menjadi suri tauladan, sebagai panutan bagi yang dipimpin. Eddy menjelaskan bahwa kemajuan dan keberhasilan Kemenkum ini bukanlah di tangan segelintir orang, tapi di tangan kita semua untuk mengelola kementerian ini dengan baik, dengan hati nurani, penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus, dan sabar, demi kepentingan bangsa dan negara.

"Saya yakin, karena bapak/ibu yang dilantik hari ini berdasarkan prestasi yang bapak/ibu miliki. Bapak/ibu akan bisa bekerja dengan baik, memenuhi tidak hanya harapan pimpinan, tapi harapan bangsa dan negara untuk memajukan Kemenkum," ujarnya.

Wamenkum mengaku menggunakan manajemen talenta sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai. Dalam manajemen talenta, terdapat sembilan boks manajemen talenta atau juga dikenal sebagai sembilan boks matriks. Boks ini nantinya adalah alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan pegawai berdasarkan tingkat kinerja dan potensi mereka.

"Bapak/ibu yang dilantik pada hari ini rata-rata berada pada boks sembilan dan boks delapan. Jadi kami mengangkat bapak/ibu itu bukan berdasarkan like and dislike, tapi betul-betul berdasarkan kinerja, dan kami melihat track record bapak/ibu selama menjabat," jelas Eddy.

Terdapat 22 Pegawai Negeri Sipil yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum dan nantinya akan ditempatkan di berbagai lokasi, baik pusat ataupun wilayah.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan apresiasi mendalam atas pesan moral yang disampaikan Wamenkum mengenai hakikat kepemimpinan yang sejati.

"Petuah bijak 'leiden is lijden' yang diangkat Wamenkum menjadi pengingat penting bagi kami semua bahwa menjadi pemimpin adalah tentang ketulusan untuk melayani, keberanian untuk memikul tanggung jawab, dan konsistensi menjadi teladan," ujar Meidy.

Ia menegaskan, nilai-nilai tersebut akan terus dipegang teguh dalam setiap langkah pelayanan di Kalimantan Selatan.

Meidy juga menyampaikan ucapan selamat dan menyambut hangat kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan yang baru, Alex Cosmas Pinem, yang turut dilantik dalam momen tersebut.

"Kami siap mendukung penuh kepemimpinan beliau dan bersinergi membawa Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan semakin berdampak dalam pelayanan hukum di daerah," tutupnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Pemajuan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Amuntai, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berkomitmen mendorong pemajuan potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah melalui kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (08/07/2025) di Aula Gedung Dr. KH Idham Chalid, Amuntai, ini dihadiri langsung oleh Bupati HSU, Sahrujin, beserta Wakil Bupati dan jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HSU dan lebih dari 100 inovator daerah. Tim pelaksana dari Kanwil Kemenkum Kalsel dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI bersama Tim Layanan KI Kemenkum dan Helpdesk KI.

Dalam paparannya, Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menyampaikan data layanan pemajuan KI di Kabupaten HSU selama dua tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kanwil untuk mendorong inovasi masyarakat yang terlindungi secara hukum.

Bupati HSU dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten HSU untuk memperkuat sinergi dengan Kanwil dalam memajukan layanan KI, mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual lokal yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu daya saing daerah.

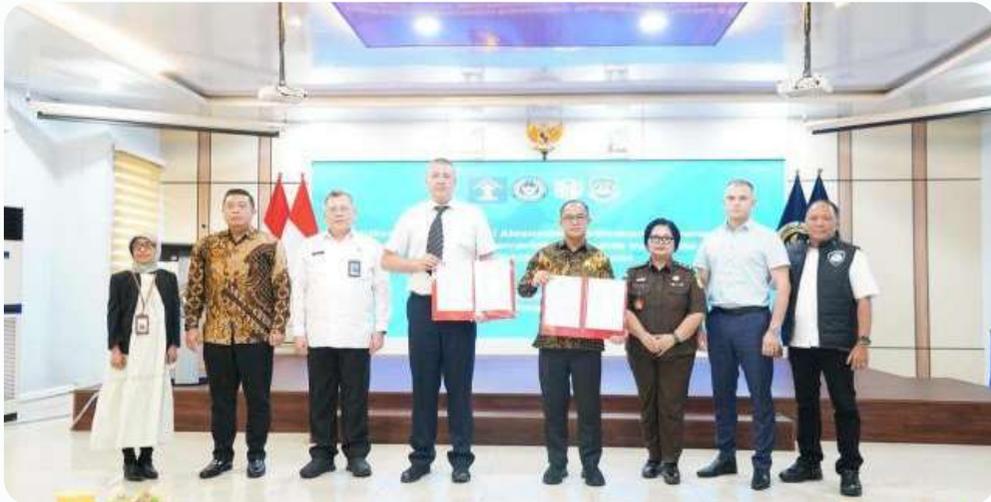
Melalui inventarisasi data yang disampaikan langsung kepada pimpinan daerah tertinggi, diharapkan kerja sama ini mampu mendorong peningkatan jumlah pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya nyata Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan edukasi dan fasilitasi bagi pemerintah daerah dalam memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi inovasi dan kemajuan daerah.





Pemerintah Indonesia Melalui Kemenkum Serahkan Alexander Vladimirovich Zverev Dalam Rangka Ekstradisi Pertama dengan Rusia



Jakarta, 10 Juli 2025 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan warga negara Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ) kepada Pemerintah Federasi Rusia, pada Kamis, 10 Juli 2025. Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Federasi Rusia kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juni 2022.

Proses ekstradisi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tertanggal 2 Juni 2025.

Keputusan tersebut mengabulkan permohonan ekstradisi dan menunjuk Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai otoritas pusat untuk melaksanakan penyerahan AVZ kepada pihak pemohon. Keputusan Presiden ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rangkaian penyerahan AVZ diawali dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Minutes of Surrender oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan perwakilan dari Pemerintah Federasi Rusia.

Penandatanganan ini disaksikan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Penyerahan AVZ kepada Pemerintah Federasi Rusia ini merupakan ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rusia.

"Meski Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia saat ini masih dalam proses ratifikasi, pelaksanaan ekstradisi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas," Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.

Ekstradisi ini juga berlangsung dalam momen bersejarah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Federasi Rusia, menandai hubungan yang semakin erat dan saling percaya dalam upaya bersama menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses ekstradisi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (due diligence), penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional, guna menghadapi tantangan global terkait kejahatan lintas negara yang semakin kompleks," ucap Widodo.

Melalui langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam membangun sistem hukum internasional yang adil, transparan, dan profesional.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah menanggapi bahwa ekstradisi Alexander Zverev merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Ini juga mencerminkan kepercayaan global terhadap integritas sistem hukum di Indonesia.

"Keberhasilan ini menjadi pengingat bagi jajaran daerah, termasuk Kalimantan Selatan, untuk terus memperkuat koordinasi, menjunjung tinggi profesionalisme dalam menghadapi tantangan hukum lintas negara," ungkapnya.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)